



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7079-7089

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ambon

Fenly Masawoi^{1✉}, Samsons Laurens², J.Madubun³

(1,3) Universitas Pattimura Ambon, (2) Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email: fmasawoy@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial pemerintah Kota Ambon. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah model implementasi Edward III yakni sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi penulis menggunakan Informan penelitian adalah pegawai Sekretariat Daerah Kota Ambon yang terlibat langsung dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial sebagai informan penelitian Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yakni Sekretaris Daerah Kota Ambon. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Aspek komunikasi perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam penerapan strategi Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah, (2) Aspek sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial selaku salah satu pelaksana Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah ini sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga arahan yang diberikan untuk kegiatan perencanaan penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik, (3) Aspek disposisi belum berjalan sebagai mana mestinya, karena karakter dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu program, (4) Aspek struktur organisasi terdiri dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K dan beberapa SKD terkait lainnya seperti Dinas Sosial Kota Ambon.

Kata Kunci: *Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, Kemiskinan, Kebijakan*

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of the grant and social assistance distribution policies of the Ambon City government. The approach used to carry out the evaluation is the Edward III implementation model, namely resources, communication, disposition and bureaucratic structure. The data analysis technique in this research uses the Miles and Huberman model. The results of the research conclude that (1) The communication aspect needs to be given attention by the government in implementing the strategy for distributing Government Grants and Social Assistance, (2) The human resource aspect in the Social Service as one of the implementers of the Distribution of Government Grants and Social Assistance has fulfilled the required competencies. needed. Employees can carry out their duties in accordance with their respective fields in accordance with applicable regulations, so that the direction given for poverty reduction planning activities can be carried out properly, (3) The disposition aspect has not worked as it should, because the character of the policy implementer is one one key to success in a program, (4) The organizational structure aspect consists of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction, hereinafter abbreviated as TNP2K and several other related SKDs such as the Ambon City Social Service.

Keywords: *Grant Distribution, Social Assistance, Poverty, Policy*

PENDAHULUAN

Sebagai amanat dari Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 dan penjelasan pasal didalamnya, pemerintah juga telah melahirkan Undang Undang no.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana di dalam pasalnya khususnya pasal 19,20 khusus membahas tentang pengentasan kemiskinan. Tentu ini merupakan hukum dasar untuk implementasi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan sudah semestinya pihsk eksekutif dan legislatif di Kabupaten dan Kota melaksanakan secara maksimal karena sudah ada payung hukum negara

Banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain; konsep, pendekatan, strategi, rumusan, teknik, taktik, dan pelaksana serta keberfihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, berbagai faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap, sehingga mampu mengatasi problem kemiskinan secara tepat dan komprehensif. Jika salah satu faktor terbaikan, maka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka lebar, yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai faktor pendukung kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan harus tepat dan efektif.

Secara kelembagaan upaya untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini relative masih tinggi. Kota Ambon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki penduduk miskin. Berdasarkan data BPS Kota Ambon Tahun 2021, jumlah penduduk miskin kota Ambon 30.893 jiwa, sedangkan penduduk miskin baru 23.365 jiwa. Sehingga total penduduk miskin 52.258 atau 14,17 persen dari jumlah penduduk Kota Ambon.

Penduduk miskin dan miskin baru tersebar di semua desa, negeri dan kelurahan di Kota Ambon. Di Kecamatan Sirimau terdapat 17.757 penduduk miskin atau 32,7 persen. Kemudian, Kecamatan Nusaniwe terdapat 16,721 penduduk miskin atau 30,8 persen, di Kecamatan Teluk Ambon 8.466 jiwa atau 15,6 persen. Sedangkan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala terdapat 8.404 jiwa atau 15,5 persen dan Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 2.910 penduduk miskin atau 5,4 persen.

Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan, seperti penyaluran hibah dan bantuan sosial.. Penyediaan jaring pengaman sosial dilakukan dengan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 7.174 penerima manfaat. Program sembako sebanyak 13.234 penerima hingga bulan Agustus dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga sebanyak 9.395 penerima manfaat. Selain itu melalui dana desa dan alokasi dana desa telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 11.373 penerima manfaat di desa dan negeri. Sedangkan melalui dana APBD kota Ambon telah disalurkan bantuan sembako yang dilakukan sejak April 2020, dan hingga Agustus telah dilakukan pembagian bantuan kepada 11.992 penerima manfaat.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik terlihat dari dampaknya hasil evaluasi implementasi suatu kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bansos sebagai upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Soegijono (2014) melaporkan bahwa salah satu target keberhasilan program kerja Pemerintah Kota Ambon adalah mengurangi angka kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan masyarakat, merupakan program kerja besar, yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah kota, yang didukung oleh masyarakat. Termasuk pihak ketiga seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi dan kelompok kepentingan lainnya. Pada posisi ini sinergisitas antar institusi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Karena itu, ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, maka salah satu pilihan untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Ambon, telah berupaya melahirkan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.

Namun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan, masih diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk terus memperbaiki mekanismenya.

Demikian pula dilaporkan oleh Tahitu & Lawalata (2017) bahwa banyaknya program yang didaratkan bagi warga miskin di Kota Ambon, ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena target penurunan jumlah warga miskin yang dilakukan pemerintah kota bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang diartikan sebagai kondisi ekonomi semata.

Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Akib (2013), dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai (Arifin & Qoimah, 2021), (Julia Mahadewi, 2021), (Rizal et al., 2021), (Sugara & Ulfa, 2021).

Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon ini merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, dimana implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Yunus & Rezki, 2020), (Aneta, 2012), (Khasanah et al., 2018), (Amanda, 2016).

Adapun model implementasi yang digunakan adalah Model Implementasi Edward III yakni sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Roring, Mantiri, & Lapian (2021) bahwa untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yakni Agustus-September 2023 di Pemerintah Kota Ambon. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pegawai Sekretariat Daerah Kota Ambon yang terlibat langsung dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial sebagai informan penelitian. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) dengan informan kunci yakni Sekretaris Daerah Kota Ambon. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2007), dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon menjadi krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam merancang kebijakan penyaluran tersebut menjadi kunci utama agar masyarakat memahami dan mempercayai proses penyaluran bantuan, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan tersebut, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang mungkin muncul serta sebagai dasar perbaikan kebijakan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan.

Pengalaman dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui pemberdayaan yang mencakup peningkatan kemampuan, pengembangan kewirausahaan, dan akses terhadap modal ekonomi, masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Selain itu, pendekatan studi mikro yang mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin juga diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan model implementasi yang tepat, seperti Model Implementasi Edward III komunikasi yang mencakup sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon dapat dilakukan secara efektif dan berhasil mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antar instansi merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan, terutama dalam konteks penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon. Komunikasi dan koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menjadi urat nadi organisasi untuk menjamin keberhasilan program dengan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Koordinasi ini dilakukan secara berkala dan melibatkan banyak SKPD, termasuk Dinas Sosial, dalam pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Pentingnya komunikasi personal antar kepala bidang juga ditekankan untuk mempercepat pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang harus segera diselesaikan, sehingga proses koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, proses sosialisasi program penyaluran hibah dan bantuan sosial merupakan aspek penting dalam penerapan kebijakan ini. Komunikasi yang efektif kepada target group, terutama masyarakat miskin, sangat diperlukan untuk memperkenalkan program dengan baik dan memastikan keberhasilannya. Sosialisasi dilakukan baik secara formal maupun informal oleh berbagai instansi, termasuk LSM, untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam program-program tersebut. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan sistem koordinasi antarinstansi juga sangat diperlukan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat miskin serta memastikan pemahaman yang baik tentang program-program yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Kota Ambon (Entjaurau et al., 2021), (Roring et al., 2021).

Sumber Daya

Sumber daya finansial dan sumber daya manusia merupakan dua aspek kunci yang mendukung implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks penyaluran hibah dan

bantuan sosial di Kota Ambon. Sumber daya finansial, yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN, merupakan hal utama yang diperlukan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun. Pentingnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut menjadi fokus utama dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai di Dinas Sosial Kota Ambon telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan arahan yang diberikan (Ratna & Moedy, 2022), (Astariyani & Sudiarawan, 2021).

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial, penggalangan sumber daya harus memastikan tercapainya tujuan dan hasil program yang efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin. Penerjemahan kebijakan dan program ke dalam kegiatan operasional yang tepat juga menjadi kunci dalam menentukan kinerja kebijakan. Melalui Rencana Strategis Kota Ambon dan arah kebijakan pembangunan, penanganan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, upaya komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan diperlukan, sesuai dengan prioritas daerah yang diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dukungan pemerintah melalui koordinasi yang efektif, evaluasi terhadap tahapan penanganan kemiskinan, serta partisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Rani & Safarinda, 2020), (Amanda, 2016).

Disposisi

Para pelaksana kebijakan, seperti Dinas Sosial Kota Ambon dalam konteks penyaluran hibah dan bantuan sosial, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Disposisi implementor, yang mencakup respon, kognisi, dan intensitas disposisi, mempengaruhi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui koordinasi dengan SKPD lain dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk menjalankan program sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Namun, pentingnya disposisi yang baik, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sorotan penting. Meskipun berbagai program telah dilakukan, evaluasi terhadap aspek disposisi menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial dan instansi lainnya bertanggung jawab atas kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dengan mengacu pada kebijakan pembangunan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kota Ambon. Meskipun berbagai program telah diluncurkan lintas sektor, termasuk Program Indonesia Pintar, Kartu Ambon Pintar, dan Bantuan Sosial Tunai, evaluasi terhadap aspek disposisi menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan karakter pelaksana kebijakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang disposisi implementor dan upaya untuk meningkatkan karakteristik yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlu menjadi fokus dalam memastikan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon.

Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran agen pelaksana dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon (TKPK) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. TKPK bertugas mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Ambon melalui berbagai program yang disusun berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran dan tugas pokok serta fungsi organisasi perangkat daerah terkait. Program tersebut, seperti bantuan sosial terpadu, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dirancang dengan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, serta mengembangkan usaha ekonomi mikro dan kecil. Meskipun demikian, meski telah dilakukan upaya-upaya tersebut, data BPS Kota Ambon menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota tersebut belum menunjukkan penurunan signifikan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Dalam konteks kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon, meskipun telah diupayakan melalui program-program dan strategi yang terstruktur, angka kemiskinan masih relatif tinggi. Hal ini menandakan bahwa meskipun sudah ada wadah koordinasi seperti TKPK dan program-program yang disusun, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan tersebut. Langkah-langkah perbaikan yang diambil haruslah berdasarkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan respons dari masyarakat sasaran. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa peran TKPK dan kebijakan penyaluran

hibah serta bantuan sosial di Kota Ambon masih perlu diperkuat dan dioptimalkan untuk mencapai penurunan yang signifikan dalam angka kemiskinan di kota tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa :

1. Aspek komunikasi perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam penerapan strategi penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon, yang merupakan kemampuan para instansi pelaksana program untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, karena selama ini banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dialokasikan pada pemerintah kelurahan dan kecamatan sehingga upaya untuk keberhasilan program tersebut sangat dibutuhkan sistem koordinasi antara berbagai instansi dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa program tersebut ini yang berasal dari dinas sosial, dari dinas atau instansi BKKBN, dari dinas koperasi dan sebagainya
2. Aspek sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial selaku salah satu pelaksana kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon ini sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga arahan yang diberikan untuk kegiatan perencanaan penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik.
3. Aspek disposisi belum berjalan sebagai mana mestinya, karena karakter dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu program.
4. Aspek struktur organisasi terdiri dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2013). Implementasi Kebijakan Apa Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik UNM Makassar*, 1(1), 1–10.
- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Arifin, S., & Qoimah, D. N. (2021). Implementasi Kebijakan “Jogo Tonggo” Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Visioner*, 13(3), 531–540.
- Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluation Of Regional Policy Arrangements In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Denpasar City. *Abdi Insani*, 8(1), 65–71.
- Entjaurau, J. ., Sumampouw, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–12.
- Julia Mahadewi, K. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1879–1895.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 30–35.
- Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(2), 8–15.
- Ratna, E., & Moedy, S. (2022). Sinergi Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kelurahan Delod Peken Kabupaten Tabanan Bali. *Jurnal Cakrawarti*, 04(02), 1–8.
- Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 97–105.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahann Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan

- Sinonsyang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1–11.
- Soegijono, S. P. (2014). Pengentasan Kemiskinan di Aras Lokal. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 85–101.
- Sugara, R., & Ulfa, M. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Keagamaan Public Policy Implementation in Handling Covid-19 through a Religious Approach. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 103–132.
- Tahitu, A., & Lawalata, C. M. . (2017). Kemiskinan Perkotaan: Strategi Pemulung Di Kota Ambon. *Sosio Informa*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.388>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.